

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENGUKUR EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Muhammad Nadir¹
Universitas Al Asyariah Mandar¹

This study aims to know how the effectiveness of the performance of the Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar when viewed from the Fiscal Decentralization Ratio, Ratio of Financial Independence strip, Effectiveness Ratio PAD, Regional Financial Efficiency Ratio, and Ratio Harmony. This research is quantitative descriptive. This research was conducted at the Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Collecting data using the method of documentation. Data analysis techniques used quantitative descriptive formula: Ratio Degree of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence Ratio, Ratio Effectiveness of PAD, Regional Financial Efficiency Ratio, and Ratio Harmony. The analysis showed that the Financial Performance Revenue Service Polewali Mandar of the Year 2013-2015 seen from (1) Ratio Degree of Fiscal Decentralization can be categorized as very less, since the average of 7.97% (2) Ratio of Financial Independence Regional pattern of relationship is still quite the pattern of relationships instructive because the average magnitude of this ratio amounted to 8.95% (3) ratio effectiveness of PAD effectiveness Polewali Mandar's financial performance has been effective because the average above 100% effectiveness is 103.32%. (4) Efficiency Ratio Regional Financial can be said to be less efficient because the average financial efficiency Polewali Mandar region amounted to 97.47% (5) The ratio of harmony in mind that the average shopping area operation is still very high at 84.42% compared to the average -rata capital expenditures amounted to 19.18%, so it can be said the regional government is still less attention to regional development.

Keywords: Effectiveness, Performance, Income, and Ratio

1. Pendahuluan

Pegawai adalah salah satu elemen yang memegang tanggung jawab dalam suatu organisasi, baik itu dalam perencanaan, pelaksana dan penggerak serta sekaligus bertindak sebagai pengawas dalam pembangunan bangsa ini. Mereka tersebar diberbagai departemen, lembaga tinggi, dan instansi pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok tanah air dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi urusan daerah provinsi atau kabupaten oleh pemerintah daerah dan

DPRD. Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lain. Selain itu juga mempunyai fungsi distributif akan hal yang telah diungkapkan, fungsi regulatif baik yang menyangkut penyediaan barang dan jasa, dan fungsi ekstraktif yaitu memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka sarana membiayai aktifitas penyelenggaraan negara.

Hal ini dapat dilihat dari konsep Otonomi Daerah itu sendiri, dimana segala kewenangan yang dulunya dipegang atau dikendalikan oleh pusat diserahkan penuh ke daerah. Dengan demikian daerah harus mampu menjaga rumah tangganya sendiri, maka untuk mewujudkan atau menampakkan kemampuan daerah diperlukan adanya sumber-sumber pendapatan daerah serta manajemen keuangan daerah yang baik dan mantap, sehingga dapat mengatur sumber-sumber dana yang diperolehnya untuk membangun serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Jelaslah bahwa manajemen keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang program pembangunan daerah, baik secara fisik maupun pembangunan secara material serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disini nampak bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dan nyata dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan ini membawa konsekuensi kepada pemerintah daerah untuk mencari sendiri sumber-sumber pendapatan bagi pembangunan daerahnya sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada untuk membiayai belanja rutin atau belanja pembangunan di daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah perlu pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, yang menjadi sumber pendapatan daerah adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: a) Hasil pajak daerah, b) Hasil retribusi daerah, c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan d) Lain-lain PAD yang sah, 2) Dana Perimbangan, dan 3) lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Secara alamiah, potensi ekonomi atau potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) antar daerah tidak sama. Sehingga menghasilkan perbedaan dalam jumlah PAD yang diperoleh masing-masing daerah. Agar terjadi pemerataan dalam pembangunan maka daerah yang memiliki PAD yang belum mampu memenuhi kebutuhan daerahnya akan mendapatkan DAU (UU 32 tahu

2004, pasal 161, ayat 1 dan ayat 2). Memang ada ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan dari pusat bagi daerah yang PADnya rendah.

Penerimaan pendapatan Kabupaten Polewali Mandar masih didominasi dari sumber dana perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber PAD terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar merupakan sumber pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pajak daerah karena memiliki karakteristik daerah yang didominasi dari sektor jasa. Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, pengumpulan dan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya. Dengan demikian, Dinas Pendapatan Daerah merupakan sentral informasi mengenai tata kerja dan tata hubungan kerja antara dinas teknis yang melaksanakan pemungutan, pengumpulan, dan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010.

Kontribusi pajak daerah sangat diharapkan untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan dalam rangka mencapai otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemerintah harus lebih memperhatikan sumber penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan menggali potensi-potensi pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar agar penerimaan PAD antara pajak daerah dan retribusi daerah dapat lebih seimbang, sehingga kepastian pendapatan asli daerah lebih terjamin.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 14) deskriptif kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data berupa:

1. Data Kuantitatif. Data yang diperoleh dalam bentuk angka berupa laporan-laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti mulai dari tahun 2013-2015
2. Data Kualitatif. Yaitu data non angka yang sifatnya deskriptif dalam bentuk informasi lisan maupun tulisan yang diperoleh dari pihak instansi pemerintah yang berkompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan (observasi) dilokasi penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara kualitatif yang mempunyai relevansi dengan masalah dalam penulisan ini.

Teknik Analisis Data

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut hasil penelitian Tim Fisipol UGM menggunakan skala interval sebagaimana terlihat dalam sebagai berikut:

Tabel 1. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal. %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat baik

Sumber : Anita Wulandari (2001: 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD_t = Total Pendapatan Daerah tahun t.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel.2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% -25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% -100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007: 169)

Rasio Efektivitas PAD

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009), adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Untuk menghitung rasio ini adalah:

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% Keatas	Instruktif
90% - 100%	Konsultatif
80% - 90%	Partisipatif
60% - 80%	Delegatif
Kurang dari 60%	

Sumber : Abdul Halim (2007: 234)

Rasio Keserasian

Secara sederhana, Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Derah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4. Penghitungan Rasio DDF Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)	Kemampuan Keuangan
2013	31.200.413.841,0	808.539.104.564,00	3,86	Sangat Kurang
2014	96.599.288.473,0	951.506.827.323,00	10,15	Kurang
2015	106.992.893.820,00	1.081.510.420.174,00	9,89	Sangat Kurang

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2013 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebesar 3,86%, Pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 10,15%, dan tahun 2015 terjadi lagi penurunan menjadi 9,89%. Meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2014 namun seluruhnya dapat dikatakan kemampuan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar masih termasuk kategori sangat kurang, karena masih dalam skala interval 00,00-10,00%.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5, Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2013	31.200.413.841,0	764.933.822.622,00	4,07	Instruktif
2014	96.599.288.473,0	840.008.862.500,00	11,67	Instruktif
2015	106.992.893.820,00	973,378,447.254,00	11,11	Instruktif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 di atas, kemampuan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Polewali Mandar tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Nilai terendah terjadi pada tahun 2013 dimana nilainya sebesar 4,07% dan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 11,67%. Sedangkan tahun 2015 yaitu sebesar 11,11%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

Rasio Efektivitas PAD

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6, Penghitungan Rasio Efektivitas PAD Dinas Pendapatan Daerah Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun Anggaran	Anggaran PAD	Realisasi PAD	REPAD (%)	Kriteria
2013	36.736.807.900,00	31.200.413.841,00	117,74	Efektif
2014	92.773.927.024	96.599.288.473	96,03	Tidak Efektif
2015	109.323.926.271,00	106.992.893.820,00	102,17	Efektif

Berdasarkan perhitungan pada tabel 6, di atas dapat diketahui bahwa Efektivitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Polewali Mandar pada tahun 2014 tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih di bawah 100% yaitu 96,03%. Untuk tahun 2013 dan Tahun 2015 sudah efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu 117,74%, dan 102,17%.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7, Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Dinas Pendapatan Daerah Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	REKD (%)	Kriteria
2013	852.963.146.755,00	808.539.104.564,00	105,45	Tidak Efisien
2014	897.546.705.500,00	951.506.827.323,00	94,32	Kurang Efisien
2015	1.001.930.426.085,00	1.081.510.420.174,00	92,64	Kurang Efisien

Berdasarkan perhitungan pada tabel 7, di atas Efisiensi Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2013 Termasuk tidak efisien karena interval efisiensinya sudah diatas 100%. Hal itu terjadi karena realisasi

belanjanya lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah. Tahun 2014 dan 2015 tergolong kurang efisien karena nilai rasionya diantara 90-100%. Total belanjanya melebihi total pendapatan daerah. Hal ini diakibatkan terjadinya selisih yang cukup besar antara pendapatan dengan belanja.

Rasio Keserasian

Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada tabel 4.5 dan tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8 Penghitungan Rasio Keserasian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013-2015
(Belanja Operasi)

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi (%)
2013	804.899.180.007,00	679.091.837.620,00	84,36
2014	897.546.705.500,00	804.542.218.442,00	89,64
2015	1.001.930.426.085,00	841.733.356.465,00	84,01

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8, di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar 86,00%. Dimulai pada tahun 2013 di mana rasio nya sebesar 84,36% meningkat pada tahun 2014 menjadi 89,64%, dan mengalami penurunan lagi menjadi 84,01% pada tahun 2015.

Tabel 9, Penghitungan Rasio Keserasian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013-2015
(Belanja Modal)

Tahun Anggaran	Total Belanja (Rp)	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal
2013	804.899.180.007,00	173.117.809.135,00	21,50
2014	897.546.705.500,00	140.129.972.402,00	15,61
2015	1.001.930.426.085,00	216.543.680.363,00	21,61

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 9 di atas diketahui bahwa rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar 19,57%. Dimulai pada tahun 2013 dimana rasio nya sebesar 20,31% mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 15,61%, namun pada tahun 2015 terjadi kenaikan menjadi 21,61%.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, karena masih berada dalam skala interval 00,00%-10,00%. Berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2015 rasionya masing-masing sebesar: 3,86%;10,15%;,dan 9,89%.

Jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif, karena masih tergolong dalam interval 0%-25%. Berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2015 rasionya masing-masing sebesar: 4,07%; 11,67%; dan 11,11%.

Jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014 berjalan Tidak Efektif karena efektivitasnya masih di bawah 100% yaitu sebesar 99,39% dan 83,34%. Dan pada tahun 2013 dan 2015 sudah Efektif karena nilai yang diperoleh sudah lebih dari 100% yaitu sebesar 117,74% dan 102,17

Jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar 97,47% atau dapat dikatakan Kurang Efisien. Berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2015 rasionya masing-masing sebesar: 105,45%; 94,32% dan 92,64%.

Dan jika di lihat dari Rasio Kerasian Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar belum stabil dari tahun ketahun. Pengeluaran belanja operasi lebih besar dari belanja modal. Besarnya belanja operasi berada pada kisaran 84,36%-89,64%, rata-rata sebesar 86,00%, hal ini disebabkan oleh besarnya belanja pegawai karena penambahan jumlah pegawai negeri sipil dan dinas-dinas terbaru. Untuk belanja modal berada pada kisaran 15,61%-21,61%, rata-rata sebesar 19,57% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Daftar Pustaka

- [1] Antonius, Atosokhi. 2002. *Character Building I : Relasi Dengan Diri Sendiri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Umum
- [2] Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Agus Sartono, 2001. *Pengantar Manajemen Keuangan*, Penerbit: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- [4] Agus Sabardi, 2002. *Pengantar Manajemen Keuangan II*, Penerbit: YKPN, Yogyakarta.
- [5] Anita Wulandari. (2001). "Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* (Vol. 5, No. 2). November
- [6] Bagir Manan, 1990. "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945", *Disertasi*, Universitas Padjajaran, Bandung.
- [7] D.Rianto Nugroho, 2000, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- [8] Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah.*, Bandung : Sinar Baru
- [9] Deddy Supriady Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.* PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- [10] Fathoni Abdulrahmat, 2003. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Penerbit PT. Rineke Cipta. Jakarta
- [11] Josef Riwo Kaho, 2000, *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- [12] Hendro Sumarjo. (2010). "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret
- [13] Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung, Armico.
- [14] Lains, Alfian, 1985, *Pendapatan Daerah Dalam Orde Baru*, Prisma, Jakarta.
- [15] Manullang, M., 1983, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintahan Daerah*, Pembangunan, Jakarta.
- [16] Maryanto. 2013 "Kinerja Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". [Digilib.Uns.Ac.Id](http://digilib.uns.ac.id) Diakses Pada Tanggal 16/07/2016
- [17] Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- [18] Mohammad Mahsun. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta BPF.
- [19] Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Jakarta, Gramedia Widiasarana,
- [20] Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi (dilengkapi dengan metode R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- [21] Tangkilisan, Hessel Nogi .S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia

- [22] The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- [23] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [24] Widodo, Joko. 2008. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : Banyumedia.
- [25] Yuwono, Sony, dkk. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya : Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang : Bayumedia.